

IMPLEMENTASI AKUNTANSI SYARIAH MUDHARABAH MENURUT STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN PADA PT. BANK MUAMALAT INDONESIA CABANG MAKASSAR

Ibrahim *)

Abstract : *This study aimed to determine whether the accounting is in conformity with the Islamic mudaraba Accepted Accounting Principles (GAAP) in the PT. Bank Muamalat Indonesia Makassar Branch. The analysis method used is descriptive comparative analysis method, ie by comparing the accounting treatment for the results conducted by Bank Muamalat Indonesia Cab. Makassar with the accounting treatment under Statement of Financial Accounting Standards (IFRSs). From the analysis it can be concluded the discussion: First, for financing the accounting treatment in accordance with Financial Accounting Standards generally recognized where cash financing and measurement basis using historical cost. Second, for the accounting treatment of revenue sharing by PT. Bank Muamalat Indonesia is not in accordance with GAAP especially regarding recognition method in which the Bank Muamalat recognized on cash basis while the SAK stated that income and interest expense recognized on accrual basis. Third, for the accounting treatment of revenue in terms of fees and commissions is not appropriate because the SAK Muamalat fee and commission income is recognized immediately as revenue in all periods, while in commission income and fees SAK indirectly acknowledged its entirety as revenue in the period but estimated according the credit period. This more clearly illustrates how commissions and fees revenue in each period.*

Keyword : *Syahibul Maal, Murabahah, Al Qardhul Hasan, Character, Capacity, Capital, Condition of Economic, and Colleteral, Personality, Purpose, Prospect, and Payment, Historical cost, Current cost, Realizable/Settlement value, Present value.*

PENDAHULUAN

Standar Akuntansi Keuangan (SAK) memainkan peran penting di dalam proses pengambilan keputusan ekonomi. Dengan demikian, standar yang ditetapkan dalam pengembangan informasi keuangan mempunyai pengaruh dalam pengalokasian sumber daya di dalam perekonomian nasional. Dampak yang bisa timbul apabila ada lebih dari satu prinsip atau standar akuntansi yang diterima umum dalam pelaporan transaksi atau peristiwa, maka pilihan atas salah satu standar dari beberapa alternatif yang tersedia bisa sangat berpengaruh terhadap laporan keuangan.

Ada beberapa hal yang menyebabkan Bank Syariah khususnya Bank Muamalat cabang Makassar tetap eksis dimana krisis yaitu pertama Bank Muamalat Indonesia cabang Makassar menganut konsep perbankan menurut islam yang menjaga keseimbangan antara

sektor riil dan sektor moneter, serta tidak memberlakukan sistem bunga. Hal ini sangat berlainan dengan sistem bank konvensional yang mengembangkan sektor moneter yang tidak terkait dengan sektor riil, sehingga ketidakpastian keterkaitan ini akan membawa persoalan serius berkepanjangan yang dalam istilah finansialnya disebut *burble pricing*.

Tahap selanjutnya ketidakmampuan pengusaha untuk membayar pinjamannya akan mengakibatkan kredit macet dalam jumlah besar sehingga bank-bank yang mempunyai kredit macet itu satu persatu akan terancam aksistensinya karena di satu sisi bank harus membayar bunga deposito yang tinggi sedangkan pendapatan bunganya anjlok karena kredit macet. Hal kedua adalah nasabah Bank Muamalat cabang Makassar yaitu untuk orang-orang islam yang sudah paham dengan hukum riba ini dijelaskan oleh Allah SWT dalam surah Al Baqarah ayat

279 yang diterjemahkannya sebagai berikut : “maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa Riba) maka ketahuilah, Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. Dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan Riba), maka bagimu pokok hartamu, kamu tidak menganiaya dan tidak (pula) dianiaya”. (QS.Al Baqarah, ayat 279)

Oleh karena prinsip dasarnya berbeda maka dalam perlakuan akuntansinya juga berbeda karena pada Bank Muamalat pendapat utama bukan berasal dari selisih tingkat bunga yang disalurkan melainkan dari penghasilan usaha bagi hasil dan margin. Begitu pula bank kepada “Syahibul Maal” (pemilik dana) memberikan imbalan berdasarkan konsep “bagi hasil”, dengan tanpa bunga. Sehingga dalam perlakuan akuntansi terhadap pemberian kredit modal kerja Bank Muamalat Makassar memiliki metode tersendiri yang berbeda dengan bank konvensional. Hal ini disebabkan karena adanya perbedaan prinsip dasar yaitu pertama menyangkut teknik operasi bagi hasil (*revenue sharing*) atas dana yang disimpan. Kedua, bentuk dan teknis operasional atas pinjaman atau pembiayaan serta tata cara pelaksanaannya, dan ketiga, teknis operasional bagi hasil (*profit sharing*) atas pinjaman yang diberikan Bank Muamalat cabang Makassar.

Mengingat luasnya cakupan usaha Bank Muamalat, maka penulis akan membatasi pada perlakuan akuntansi dalam pemberian kredit modal kerja dalam bentuk mudharabah dimana penulis akan meneliti perlakuan akuntansi pada saat drooping sampai dengan adanya bagi hasil. Adanya metode pengakuan dan perlakuan dalam pemberian kredit modal kerja yang berbeda dengan metode penelitian yang digunakan oleh bank konvensional lainnya, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang bagaimana perlakuan akuntansi dalam pemberian kredit modal kerja pada Bank Muamalat Indonesia cabang

Makassar yang didasarkan pada prinsip bagi hasil. Dengan pertimbangan tersebut di atas, maka penulis menetapkan suatu judul sebagai berikut, “Perlakuan Akuntansi Pembiayaan Bagi Hasil (Mudharabah) Ditinjau Dari Standar Akuntansi Keuangan Pada PT. Bank Muamalat Indonesia Cabang Makassar”.

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Apakah akuntansi syariah mudharabah sudah sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) pada PT. Bank Muamalat Indonesia Cabang Makassar.

TUNJAUAN PUSTAKA

Konsep Pengakuan Dan Pengukuran Unsur Laporan Keuangan Menurut Standar Akuntansi Keuangan (SAK)

1. Pengakuan Unsur Laporan Keuangan

Menurut Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK), dalam kerangka dasar penyusunan dan penyajian laporan keuangan (2004:20), menyatakan pengakuan (*recognition*) merupakan proses pembentukan suatu pos yang memenuhi definisi unsur serta kriteria pengakuan yakni :

- a. Ada kemungkinan bahwa ekonomi bahwa manfaat ekonomi yang berkaitan dengan pos tersebut akan mengalir dari atau ke dalam perusahaan.
- b. Pos tersebut mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal.

Di dalam kerangka dasar penyusunan dan penyajian laporan keuangan dijelaskan tentang proses pengakuan yaitu :

- a. Pengakuan aktiva
- b. Pengakuan kewajiban
- c. Pengakuan penghasilan
- d. Pengakuan beban

2. Pengukuran Unsur Laporan Keuangan

Menurut Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK), kerangka dasar penyusunan dan penyajian laporan keuangan (2004:23) Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI) mengemukakan definisi pengukuran sebagai berikut pengukuran adalah proses penetapan jumlah uang untuk mengakui dan memasukkan setiap unsure laporan keuangan dalam neraca dan laporan laba rugi. Proses ini menyangkut pemilihan dasar pengukuran tertentu.

Konsep Akuntansi Perbankan

Di Indonesia acuan untuk penyusunan dan penyajian laporan keuangan perbankan yang dapat digunakan adalah Standar Khusus Akuntansi Perbankan Indonesia (SKAPI) yang telah disesuaikan menjadi Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 31 yang disusun oleh ikatan akuntansi Indonesia bersama bank Indonesia. Menurut Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 31, akuntansi perbankan (2009:31.1) dikemukakan bahwa Akuntansi Perbankan mengatur pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan laporan keuangan bank.

Pengertian bank menurut Ikatan Akuntan Indonesia (2004) adalah lembaga yang berperan sebagai perantara keuangan (financial intermediary) antara pihak yang memiliki dana dan pihak-pihak yang memerlukan dana, serta sebagai lembaga yang berfungsi memperlancar lalu lintas pembayaran.

Pengertian bank menurut Undang-Undang Republik Indonesia No. 10 Tahun 1998 pasal 1 (2) adalah sebagai berikut bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masya-

rakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Dari uraian di atas dapat ditarik kesimpulan, ada 2 tugas pokok dari bank yaitu :

- a. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan.
- b. Panyaluran kembali dana tersebut ke masyarakat yang lebih membutuhkan, penyaluran dana tersebut dilakukan melalui berbagai jenis kredit atau bentuk-bentuk lainnya.

Konsep Bank Syariah

1. Pengertian

Bank syariah adalah bank yang dalam aktifitasnya, baik penghimpunan dana maupun dalam penyaluran dananya memberikan dan mengenakan imbalan atas dasar prinsip syariah yaitu jual beli dan bagi hasil. Prinsip utama operasional bank yang berdasarkan prinsip syariah adalah hukum islam yang bersumber dari Al-Qur'an dan Al-Hadits. Kegiatan operasional bank harus memperhatikan perintah dan larangan dalam Al-Qur'an dan Sunnah Rasul Muhammad SAW. Larangan terutama berkaitan dengan kegiatan bank yang dapat diklasifikasikan sebagai riba. Perbedaan utama antara kegiatan bank berdasarkan prinsip syariah dengan bank konvensional pada dasarnya terletak pada system pemberian kredit imbalan atau jasa dari dana.

2. Produk Bank Syariah

Untuk dapat memberikan keuntungan maka suatu bank harus memiliki produk atau jasa yang dapat menghasilkan keuntungan. Menurut Harahap (2002:95-97), membagi produk bank syariah kedalam bagian sebagai berikut :

- a. Pembiayaan dengan margin (Murabahah)

Dalam produk ini terjadi transaksi penjualan barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (margin) yang disepakati oleh penjual dan pembeli.

b. Bai' bithaman Ajil

Di dalam konsep ini harga barang yang dijual kepada nasabah telah diperhitungkan pembayaran yang akan dilakukan kemudian baik secara angsuran maupun tangguh bayar, harga yang ditetapkan adalah berdasarkan persetujuan bersama kedua belah pihak.

c. Mudharabah

Mudharabah adalah kerjasama bank dengan pengusaha yang diyakini sepenuhnya. Bank memberikan 100% untuk kebutuhan pengusaha dalam menjalankan suatu usaha atau proyek dan pengusaha memberikan modalnya berupa tenaga dan keahlian.

d. Musyarakah

Musyarakah merupakan akad kerjasama diantara pemilik modal yang mencampurkan modal kerja mereka dengan tujuan mencari keuntungan. Dalam musyarakah, para mitra sama-sama menyediakan modal untuk membiayai suatu usaha tertentu dan bekerja bersama mengelola usaha tersebut.

e. Al Qardhul Hasan (pembiayaan kebajikan)

Produk ini merupakan produk bank syariah yang sangat khusus. Dana ini dipinjamkan kepada nasabah tanpa dikenakan kewajiban memberikan pembagian hasil atau laba. Dia hanya dibebankan biaya sehubungan proses pemberian pinjaman itu dan diwajibkan mengembalikan berapa jumlah yang dipinjamnyasemula tanpa keharusan pembagian laba.

f. Jasa Bank Lainnya

Produk bank syariah lainnya sama saja dengan bank konvensional lainnya, misalnya Bank Garansi, Transfer, Save deposit (Al Waidah), transaksi Valuta asing, Penyewaan (Ijarah), agen (Al Wakalah), Gadai (Al Rahn).

3. Pengertian dan Syarat Pemberian Kredit Modal Kerja/Pembiayaan Mudharabah

Menurut Hasibuan (2005:43) mendefinisikan mudharabah sebagai pembelian barang dengan pembayaran yang ditangguhkan (1 bulan, 3 bulan, 12 bulan dsb). Pembiayaan mudharabah adalah yang diberikan kepada nasabah dalam rangka pemenuhan kebutuhan produksi. Pembiayaan mudharabah mirip dengan kredit modal kerja yang biasa diberikan oleh bank-bank komersial dan karenanya pembiayaan mudharabah berjangka waktu di bawah 12 bulan.

METODOLOGI PENELITIAN

Metode Analisis Data

Dalam rangka menjawab masalah pokok, maka analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : analisis deskriptif komparatif, yaitu dengan memperbandingkan antara perlakuan akuntansi bagi hasil yang dilakukan oleh Bank Muamalat Indonesia Cabang Makassar dengan perlakuan akuntansi menurut Standar Akuntansi Keuangan (SAK).

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada pembahasan ini, akan menguraikan bagaimana penentuan bagi hasil dan perlakuan akuntansi yang diterapkan oleh PT. Bank Muamalat Indonesia yang disalurkan dan akan mengevaluasi sejauh mana kesesuaian perlakuan akuntansi yang diterapkan oleh Bank Muamalat tersebut dengan Standar Akuntansi Keuangan (SAK).

1. Metode Penentuan Bagi Hasil

Bagi hasil didasarkan pada kesepakatan atau negosiasi antara pihak bank dengan debitur yang dituangkan dalam akad perjanjian pembiayaan mengenai besarnya persentase pembagian keuntungan yang diperoleh pihak dari usaha mudharabah tersebut dan mengenai bagi hasil tersebut apakah didasarkan pada penjualan atau dari laba bersih tergantung dari kesepakatan kedua belah pihak. Jika bagi hasil

didasarkan pada penjualan maka bagi hasil yang diperoleh debitur lebih besar dibandingkan dengan bagi hasil untuk bank karena dia akan menanggung semua biaya yang timbul dari usaha tersebut misalnya 70% untuk debitur dan 30% untuk bank dari penjualan yang diperoleh. Tetapi jika persentase bagi hasil didasarkan pada laba bersih maka pembagian keuntungan kemungkinannya 50% : 50% atau sesuai dengan nisbah yang disepakati.

Untuk lebih jelasnya dari metode penentuan bagi hasil menurut Bank Muamalat ditentukan dengan tatacara seperti berikut :

$$BH1 = \left(\frac{\text{Sisa pokok pinjaman}}{\text{Total pokok pinjaman}} \times \text{Revenue} \right) \times \text{Persentase Bagi Hasil}$$

Untuk Bank

Dimana, BH adalah bagi hasil yang diperoleh Bank Muamalat. formulanya sebagai berikut :

$$BH1 = \left(\frac{\text{Sisa Pokok Pinjaman}}{\text{Total Pokok Pinjaman}} \times \text{Laba Bersih} \right) \times \text{Persentase Bagi Hasil Untuk Bank}$$

Jadi dari rumus di atas jelas bahwa bagi hasil yang diperoleh Bank Muamalat tergantung dari besarnya pendapatan atau laba yang diperoleh oleh perusahaan (debitur) dan besarnya pinjaman yang belum dibayar/diangsur oleh debitur. Berikut ini contoh kasus perlakuan pembiayaan mudharabah yang dilakukan oleh bank Muamalat kepada UD. Karya Baru :

Contoh Kasus 1 :

UD. Karya Baru milik Joni mulai beroperasi sejak tahun 20XX. Perusahaan ini bergerak dibidang pengolahan kayu pada tahun 20XX Joni ingin mengembangkan usahanya dengan menambah usaha meubel. Oleh karena keinginan untuk mengembangkan usahanya tersebut UD. Karya Baru mengajukan proposal pembiayaan ke PT. Bank Muamalat Indonesia Cabang Makassar dan dari hasil negosiasi dengan pihak Bank Muamalat maka bank menyetujui memberikan pembiayaan

(kredit modal kerja) mudharabah untuk usaha meubel tersebut dimana debitur/pengusaha yang menyediakan tempat dan melaksanakan usaha tersebut sedangkan Bank Muamalat menyediakan 100% modal kerja usaha meubel tersebut.

Kesepakatan yang terjadi dalam pembiayaan mudharabah tersebut sebagai berikut :

1. Total modal kerja/pembiayaan yang diberikan sebesar Rp 50.000.000
2. Persentase bagi hasil 25% untuk Bank Muamalat dan 75% untuk UD. Karya Baru dari penjualan.
3. Jaminan/agungan sertifikasi tanah dan gedung.
4. Jangka waktu pembiayaan adalah 24 bulan (2 tahun) dan pokok pinjaman diangsur dua kali.
5. Pembiayaan jatuh tempo pada tanggal 30 Juni 20XX.

Dari hasil operasi selama 24 bulan dapat dilihat pendapatan dari usaha meubel UD. Karya Baru dan bagi hasil yang

diperoleh Bank Muamalat seperti tabel pada halaman berikut :

TABEL 1
PT. Bank Muamalat Indonesia
Pendapatan Bagi Hasil

Nama Nasabah	:	UD. KARYA BARU
Pokok Pembiayaan	:	Rp. 50.000.000
Jangka Waktu	:	24 Bulan
Bagi Hasil	:	25% dari volume
Angsuran Pokok	:	Per 12 Bulan
Angsuran Bagi Hasil	:	Per 1 Bulan
Pendapatan Provisi	:	1% dari pokok pembiayaan

No	Pokok Pembiayaan	Tanggal Angsuran	Total Angsuran	Sisa Pokok Pembiayaan	Revenue	Bagi Hasil
	1	2	3	4 = (1 - 3)	5	6 = (4/1) * 5 * 25%
1	50,000,000	07-01-08	0	50,000,000	14,000,000	3,500,000
2	50,000,000	08-01-08	0	50,000,000	18,000,000	4,500,000
3	50,000,000	09-01-08	0	50,000,000	16,500,000	4,125,000
4	50,000,000	10-01-08	0	50,000,000	17,750,000	4,437,500
5	50,000,000	11-01-08	0	50,000,000	16,850,000	4,212,500
6	50,000,000	12-01-08	0	50,000,000	18,500,000	4,625,000
7	50,000,000	01-01-09	0	50,000,000	17,500,000	4,375,000
8	50,000,000	02-01-09	0	50,000,000	16,000,000	4,000,000
9	50,000,000	03-01-09	0	50,000,000	17,750,000	4,437,500
10	50,000,000	04-01-09	0	50,000,000	8,750,000	2,187,500
11	50,000,000	05-01-09	0	50,000,000	17,000,000	4,250,000
12	50,000,000	06-01-09	0	50,000,000	18,200,000	4,550,000
13	50,000,000	07-01-09	25,000,000	25,000,000	15,500,000	1,937,500
14	50,000,000	08-01-09	25,000,000	25,000,000	14,450,000	1,806,250
15	50,000,000	09-01-09	25,000,000	25,000,000	15,000,000	1,875,000
16	50,000,000	10-01-09	25,000,000	25,000,000	13,750,000	1,718,750
17	50,000,000	11-01-09	25,000,000	25,000,000	15,450,000	1,931,250
18	50,000,000	12-01-09	25,000,000	25,000,000	15,000,000	1,875,000
19	50,000,000	01-01-10	25,000,000	25,000,000	15,500,000	1,937,500
20	50,000,000	02-01-10	25,000,000	25,000,000	14,750,000	1,843,750
21	50,000,000	03-01-10	25,000,000	25,000,000	14,500,000	1,812,500
22	50,000,000	04-01-10	25,000,000	25,000,000	15,000,000	1,875,000
23	50,000,000	05-01-10	25,000,000	25,000,000	15,750,000	1,968,750
24	50,000,000	06-01-10	25,000,000	25,000,000	15,000,000	1,875,000
25	50,000,000	06-30-10	50,000,000	-	-	-

Sumber :data sudah diolah

Contoh 2

PT. Niaga Abadi memerlukan dana untuk menambah modal kerja usaha perdagangannya. Untuk keperluan tersebut PT. Niaga Abadi mengajukan Fasilitas Pembiayaan kepada Bank Muamalat dengan total kebutuhan dana Rp. 150.000.000,- Setelah dilakukan

analisa keuangan, maka disetujui Fasilitas Mudharabah oleh Bank Muamalat kepada PT. Niaga Abadi, dengan persyaratan Fasilitas Mudharabah sebagai berikut :

- 1) Total modal kerja/pembiayaan yang diberikan sebesar Rp 150.000.000,-

- 2) Presentase bagi hasil 30% untuk bank muamalat dan 70% untuk PT. Niaga Abadi dari penjualan
- 3) Jaminan sertifikat tanah dan gedung
- 4) Jangka waktu pembiayaan adalah 36 bulan (3tahun) dan pokok pinjaman diangsur 2 kali
- 5) Pembiayaan jatuh tempo pada tanggal 30 Mei 20xx

TABEL 2
PT. Bank Muamalat Indonesia
Pendapatan Bagi Hasil

Nama Nasabah	:	PT.NIAGA ABADI				
Pokok Pembiayaan	:	Rp. 150.000.000				
Jangka Waktu	:	36 Bulan				
Bagi hasil	:	30% dari volume				
Angsuran Pokok	:	per 12 bulan				
Angsuran Bagi Hasil	:	per 1 bulan				
Pendapatan Provisi	:	1 % dri pembiayaan				

NO	POKOK PEMBIAYAAN	TANGGAL ANGSURAN	TOTAL ANGSURAN	SISA POKOK PEMBIAYAA N	REVENUE	BAGI HASIL
	1	2	3	4=(1-3)	5	6=(4/1)*5*30%
1	150,000,000	5/1/2009	-	150,000,000	20,000,000	6,000,000
2	150,000,000	6/1/2009	-	150,000,000	25,000,000	7,500,000
3	150,000,000	7/1/2009	-	150,000,000	18,500,000	5,550,000
4	150,000,000	8/1/2009	-	150,000,000	19,000,000	5,700,000
5	150,000,000	9/1/2009	-	150,000,000	18,500,000	5,550,000
6	150,000,000	10/1/2009	-	150,000,000	18,550,000	5,565,000
7	150,000,000	11/1/2009	-	150,000,000	19,500,000	5,850,000
8	150,000,000	12/1/2009	-	150,000,000	22,000,000	6,600,000
9	150,000,000	1/1/2010	-	150,000,000	16,500,000	4,950,000
10	150,000,000	2/1/2010	-	150,000,000	13,500,000	4,050,000
11	150,000,000	3/1/2010	-	150,000,000	17,000,000	5,100,000
12	150,000,000	4/1/2010	-	150,000,000	18,200,000	5,460,000
13	150,000,000	5/1/2010	100,000,000	100,000,000	23,500,000	4,700,000
14	150,000,000	6/1/2010	100,000,000	100,000,000	17,000,000	3,400,000
15	150,000,000	7/1/2010	100,000,000	100,000,000	16,650,000	3,330,000
16	150,000,000	8/1/2010	100,000,000	100,000,000	22,000,000	4,400,000
17	150,000,000	9/1/2010	100,000,000	100,000,000	23,550,000	4,710,000
18	150,000,000	10/1/2010	100,000,000	100,000,000	19,550,000	3,910,000
19	150,000,000	11/1/2010	100,000,000	100,000,000	21,450,000	4,290,000
20	150,000,000	12/1/2010	100,000,000	100,000,000	16,750,000	3,350,000
21	150,000,000	1/1/2011	100,000,000	100,000,000	18,650,000	3,730,000
22	150,000,000	2/1/2011	100,000,000	100,000,000	16,000,000	3,200,000
23	150,000,000	3/1/2011	100,000,000	100,000,000	14,000,000	2,800,000
24	150,000,000	4/1/2011	100,000,000	100,000,000	18,500,000	3,700,000
25	150,000,000	5/1/2011	50,000,000	50,000,000	23,500,000	2,350,000
26	150,000,000	6/1/2011	50,000,000	50,000,000	22,850,000	2,285,000
27	150,000,000	7/1/2011	50,000,000	50,000,000	19,750,000	1,975,000
28	150,000,000	8/1/2011	50,000,000	50,000,000	18,500,000	1,850,000
29	150,000,000	9/1/2011	50,000,000	50,000,000	23,750,000	2,375,000
30	150,000,000	10/1/2011	50,000,000	50,000,000	22,750,000	2,275,000
31	150,000,000	11/1/2011	50,000,000	50,000,000	16,750,000	1,675,000
32	150,000,000	12/1/2011	50,000,000	50,000,000	15,750,000	1,575,000
33	150,000,000	1/1/2012	50,000,000	50,000,000	21,850,000	2,185,000
34	150,000,000	2/1/2012	50,000,000	50,000,000	22,000,000	2,200,000
35	150,000,000	3/1/2012	50,000,000	50,000,000	17,500,000	1,750,000
36	150,000,000	4/1/2012	50,000,000	50,000,000	18,500,000	1,850,000
37	150,000,000	5/31/2012	150,000,000	-		-

Sumber :data sudah diolah

Contoh 3

PT. Bank Muamalat melakukan kerjasama bisnis dengan Ibu Yolanda, seorang pedagang buku menggunakan akad mudharabah (Bank Muamalat sebagai pemilik dana dan Yolanda sebagai pengelola dana). Bank Muamalat memberikan modal kepada Yolanda sebesar Rp 10.000.000 sebagai modal usaha pada Tanggal 1 Januari 2009 dan berakhir 1 Januari 2010 dengan nisbah bagi hasil : Yolanda : Bank Muamalat = 75%: 25%. Dengan persyaratan sebagai berikut :

- 1) Total modal kerja/pembiayaan yang diberikan sebesar Rp. 10.000.000
- 2) Persentase bagi hasil 30% untuk Bank Muamalat dan 70% untuk bapak Irfa dari penjualan
- 3) Jaminan/agungan sertifikasi tanah dan gedung.
- 4) Jangka waktu pembiayaan adalah 12 bulan (1 tahun) dan pokok pinjaman diangsur dua kali
- 5) Pembiayaan jatuh tempo 31 Februari 2010

TABEL 3
PT. Bank Muamalat Indonesia
Pendapatan Bagi Hasil

Nama Nasabah	:	Ibu Yolanda				
Pokok Pembiayaan	:	Rp 10.000.000				
Jangka Waktu	:	12 Bulan				
Bagi hasil	:	25% dari volume				
Angsuran Pokok	:	per 12 bulan				
Angsuran						
Bagi Hasil	:	per 1 bulan				
Pendapatan Provisi	:					

NO.	POKOK PEMBIAYAAN	TANGGAL ANGSURAN	TOTAL ANGSURAN	SISA POKOK PEMBIAYAAN	REVENUE	BAGI HASIL
	1	2	3	4=(1-3)	5	6=(4/1)*5*25%
1	10,000,000	2/1/2009	-	10,000,000	2,000,000	500,000
2	10,000,000	3/1/2009	-	10,000,000	1,650,000	412,500
3	10,000,000	4/1/2009	-	10,000,000	1,700,000	425,000
4	10,000,000	5/1/2009	-	10,000,000	1,000,000	250,000
5	10,000,000	6/1/2009	-	10,000,000	1,250,000	312,500
6	10,000,000	7/1/2009	-	10,000,000	1,300,000	325,000
7	10,000,000	8/1/2009	5,000,000	5,000,000	950,000	475,000
8	10,000,000	9/1/2009	5,000,000	5,000,000	1,250,000	625,000
9	10,000,000	10/1/2009	5,000,000	5,000,000	850,000	425,000
10	10,000,000	11/1/2009	5,000,000	5,000,000	775,000	387,500
11	10,000,000	12/1/2009	5,000,000	5,000,000	1,750,000	875,000
12	10,000,000	1/1/2010	5,000,000	5,000,000	1,800,000	900,000
13	10,000,000	1/29/2010	10,000,000	-	-	-

Sumber : data sudah diolah

Contoh 4

PT. Arham memerlukan dana untuk menambah modal kerja usaha. Untuk keperluan tersebut PT. Arham mengajukan Fasilitas Pembiayaan kepada Bank Muamalat dengan total kebutuhan dana Rp. 60.000.000,- Setelah dilakukan

analisa keuangan, maka disetujui Fasilitas Mudharabah oleh Bank Muamalat kepada PT. Arham, dengan persyaratan Fasilitas Mudharabah sebagai berikut :

- 1) Total modal kerja/pembiayaan yang diberikan sebesar Rp 60.000.000,-

- 2) Presentase bagi hasil 20% untuk bank muamalat dan 80% untuk PT. Arham dari penjualan
- 3) Jaminan sertifikat tanah
- 4) Jangka waktu pembiayaan adalah 24 bulan (2tahun) dan pokok pinjaman diangsur 2 kali
- 5) Pembiayaan jatuh tempo pada tanggal 30 Mei 2010

TABEL 4
PT. Bank Muamalat Indonesia
Pendapatan Bagi Hasil

Nama Nasabah	:	PT. ARHAM				
Pokok Pembiayaan	:	Rp.60.000.000				
Jangka Waktu	:	24 Bulan				
Bagi hasil	:	20% dari volume				
Angsuran Pokok	:	per 12 bulan				
Angsuran						
Bagi Hasil	:	per 1 bulan				
Pendapatan Provisi	:	1 % dri pembiayaan				

NO	POKOK PEMBIAYAAN	TANGGAL ANGGSURAN	TOTAL ANGSURAN	SISA POKOK PEMBIAYAAN	REVENUE	BAGI HASIL
	1	2	3	4=(1-3)	5	6=(4/1)*5*20%
1	60,000,000	01/05/08	-	60,000,000	18,000,000	3,600,000
2	60,000,000	01/06/08	-	60,000,000	16,500,000	3,300,000
3	60,000,000	01/07/08	-	60,000,000	15,750,000	3,150,000
4	60,000,000	01/08/08	-	60,000,000	19,550,000	3,910,000
5	60,000,000	01/09/08	-	60,000,000	8,750,000	1,750,000
6	60,000,000	01/10/08	-	60,000,000	14,250,000	2,850,000
7	60,000,000	01/11/08	-	60,000,000	13,250,000	2,650,000
8	60,000,000	01/12/08	-	60,000,000	9,500,000	1,900,000
9	60,000,000	01/01/09	-	60,000,000	11,750,000	2,350,000
10	60,000,000	01/02/09	-	60,000,000	16,550,000	3,310,000
11	60,000,000	01/03/09	-	60,000,000	14,320,000	2,864,000
12	60,000,000	01/04/09	-	60,000,000	14,109,000	2,821,800
13	60,000,000	01/05/09	30,000,000	30,000,000	15,500,000	1,550,000
14	60,000,000	01/06/09	30,000,000	30,000,000	17,850,000	1,785,000
15	60,000,000	01/07/09	30,000,000	30,000,000	7,850,000	785,000
16	60,000,000	01/08/09	30,000,000	30,000,000	11,750,000	1,175,000
17	60,000,000	01/09/09	30,000,000	30,000,000	16,000,000	1,600,000
18	60,000,000	01/10/09	30,000,000	30,000,000	17,800,000	1,780,000
19	60,000,000	01/11/09	30,000,000	30,000,000	10,000,000	1,000,000
20	60,000,000	01/12/09	30,000,000	30,000,000	12,500,000	1,250,000
21	60,000,000	01/01/10	30,000,000	30,000,000	14,250,000	1,425,000
22	60,000,000	01/02/10	30,000,000	30,000,000	15,000,000	1,500,000
23	60,000,000	01/03/10	30,000,000	30,000,000	14,500,000	1,450,000
24	60,000,000	01/04/10	30,000,000	30,000,000	15,000,000	1,500,000
25	60,000,000	01/05/10	30,000,000			

Sumber : data sudah diolah

Contoh 5

PT.Bank Muamalat melakukan kerjasama bisnis dengan Bapak Indra , seorang pengusaha Elektronik di Makassar Trade Center menggunakan

akad mudharabah (Bank Muamalat sebagai pemilik dana dan Indra sebagai pengelola dana). Bank Muamalat memberikan modal kepada Indra sebesar Rp 80.000.000 sebagai modal usaha pada Tanggal 1 Maret 2008 dan berakhir 31

April 2009 dengan nisbah bagi hasil : 25%
 Bapak Indra : Bank Muamalat = 75%:

TABEL 5
PT. Bank Muamalat Indonesia

Nama Nasabah	:	Bpk. Indra				
Pokok Pembiayaan	:	Rp. 80.000.000				
Jangka Waktu	:	12 Bulan				
Bagi hasil	:	25% dari volume				
Angsuran Pokok	:	Per 12 Bulan				
Angsuran						
Bagi Hasil	:	Per 1 Bulan				
Pendapatan Provisi	:	1% dari pokok pembiayaan				
NO	POKOK PEMBIAYAAN	TANGGAL ANGSURAN	TOTAL ANGSURAN	SISA POKOK PEMBIAYAAN	REVENUE	BAGI HASIL
	1	2	3	4=(1-3)	5	6=(4/1)*5*25%
1	80,000,000	01/03/08	-	80,000,000	18,000,000	4,500,000
2	80,000,000	01/04/08	-	80,000,000	16,500,000	4,125,000
3	80,000,000	01/05/08	-	80,000,000	15,750,000	3,937,500
4	80,000,000	01/06/08	-	80,000,000	19,550,000	4,887,500
5	80,000,000	01/07/08	-	80,000,000	8,750,000	2,187,500
6	80,000,000	01/08/08	-	80,000,000	14,250,000	3,562,500
7	80,000,000	01/11/08	40,000,000	40,000,000	13,250,000	1,656,250
8	80,000,000	01/12/08	40,000,000	40,000,000	9,500,000	1,187,500
9	80,000,000	01/01/09	40,000,000	40,000,000	11,750,000	1,468,750
10	80,000,000	01/02/09	40,000,000	40,000,000	16,550,000	2,068,750
11	80,000,000	01/03/09	40,000,000	40,000,000	14,320,000	1,790,000
12	80,000,000	01/04/09	40,000,000	40,000,000	14,109,000	1,763,625
13	80,000,000	31/05/09	80,000,000	-		-

Sumber : data sudah diolah

1. Pengukuran Pembiayaan Mudharabah dan Bagi Hasil

Dasar pengukuran yang digunakan oleh bank Muamalat Indonesia terhadap pembiayaan mudharabah sebagai komponen dari aktiva adalah dengan menggunakan konsep pengukuran berdasarkan historical cost dimana aktiva ini dicatat dan disajikan dalam laporan keuangan sebesar pengeluaran kas atau setara kas yang dibayar atau sebagai nilai wajar yang diberikan untuk memperoleh aktiva tersebut pada saat perolehan atau dengan kata lain kredit yang diberikan dalam rangka pembiayaan dicatat sebesar tagihan bank yang bersangkutan. Demikian pula dengan bagi hasil yang diterima diukur berdasarkan konsep pengukuran historical cost.

2. Evaluasi Perlakuan Akuntansi Pembiayaan Mudharabah Ditinjau dari Standar Akuntansi Keuangan.

a) Evaluasi terhadap pembiayaan mudharabah

Dalam hal penyajian laporan keuangan pembiayaan mudharabah pada PT. Bank Muamalat Indonesia yang disajikan pada neraca sebagai salah satu komponen dari pembiayaan yang diberikan setelah dikurangi dengan penyisihan penghapusan pembiayaan pada prinsipnya sama dengan SAK hanya namanya yang berbeda hal ini dapat dilihat pada PSAK No. 31.

b) Evaluasi terhadap pendapatan bagi hasil

Konsep pengakuan terhadap pendapatan bagi hasil

pada Bank Muamalat Indonesia seperti yang telah dijelaskan di atas. Dimana pada konsep pengakuan pendapatannya diakui berdasarkan metode kas basis tidak sesuai dengan SAK khususnya PSAK No. 31.8.02. Dimana pada PSAK tersebut pendapatan dan beban bunga diakui secara akrual basis kecuali pendapatan bunga dari kredit dan aktiva produktif lainnya yang non performing.

c) Evaluasi Terhadap Pendapatan Komisi dan Provisi

Dalam hal evaluasi terhadap pendapatan komisi dan provisi dimana pada PT. Bank Muamalat Indonesia pendapatan komisi dan provisi diakui secara kas basis dan langsung diakui

sebagai pendapatan pada periode tersebut. Sedangkan pada SAK pendapatan komisi dan provisi diakui secara akrual. Hal ini tidak sesuai dengan SAK (khususnya PSAK No. 31.08.05) yaitu komisi dan provisi yang berkaitan langsung dengan kegiatan perkreditan diakui sebagai pendapatan dan beban yang ditangguhkan dan akan diamortisasi secara sistematis selama jangka waktu komitmen kredit dan mengenai konsep pengukuran pendapatan komisi dan provisi pada Bank Muamalat diukur berdasarkan historical cost sedangkan pada SAK tidak ada penjelasan mengenai konsep pengukuran pendapatan komisi dan provisi.

Berikut ini tabel perbandingan perlakuan akuntansi antara SAK dengan Bank Muamalat :

Aspek	SAK		Bank Muamalat		Kesimpulan
	Pengakuan	Pengukuran	Pengakuan	Pengukuran	
1. Perlakuan akuntansi untuk pembiayaan mudharabah	Kas basis	Historical cost	Kas basis	Historical cost	Untuk perlakuan akuntansi pembiayaan mudharabah telah sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku umum dimana pembiayaan mudharabah diakui secara kas basis dan pengukurannya menggunakan historical cost.
2. Perlakuan akuntansi untuk pendapatan bagi hasil	Akrual basis	Tidak ada penjelasan dari konsep pengukuran dari pendapatan untuk usaha perbankan	Kas basis	Historical cost	Untuk perlakuan akuntansi pendapatan bagi hasil dalam pembagian kredit modal kerja oleh PT. Bank Muamalat Indonesia tidak sesuai dengan SAK khususnya mengenai metode pengakuannya dimana pada bank Muamalat diakui berdasarkan kas basis, sedangkan pada SAK khususnya PSAK No.31 dinyatakan bahwa pendapatan dan beban bunga diakui secara akrual.
3. Perlakuan akuntansi untuk pendapatan provisi dan komisi	Akrual basis	Tidak ada penjelasan mengenai konsep pengukuran pendapatan provisi dan komisi	Kas basis	Historical cost	Untuk perlakuan akuntansi pendapatan provisi dan komisi ditinjau dari SAK tidak sesuai karena pada bank Muamalat pendapatan provisi dan komisi langsung diakui semua sebagai pendapatan pada periode tersebut, sedangkan pada SAK pendapatan provisi dan komisi tidak langsung diakui keseluruhannya sebagai pendapatan pada periode tersebut tetapi diestimasi sesuai dengan jangka waktu kredit. Hal ini lebih jelas menggambarkan berapa pendapatan komisi dan provisi pada setiap periode.

KESIMPULAN DAN SARAN

Sebagai penutup dari penulisan skripsi ini penulis akan menyampaikan beberapa kesimpulan dan saran yang berhubungan dengan pembahasan sebelumnya sesuai dengan ruang lingkup yang penulis bahas.

Kesimpulan

Berdasarkan uraian pada bagian pembahasan dapat disimpulkan perlakuan akuntansi dalam hal pembiayaan bagi hasil (mudharabah) ditinjau dari SAK adalah sebagai berikut :

1. Untuk perlakuan akuntansi pembiayaan mudharabah telah sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku umum dimana pembiayaan mudharabah diakui secara kas basis dan pengukurannya menggunakan historical cost.
2. Untuk perlakuan akuntansi pendapatan bagi hasil oleh PT. Bank Muamalat Indonesia tidak sesuai dengan SAK khususnya mengenai metode pengakuannya dimana pada Bank Muamalat diakui berdasarkan kas basis sedangkan pada SAK dinyatakan bahwa pendapatan dan beban bunga diakui secara akrual
3. Untuk perlakuan akuntansi pendapatan provisi dan komisi ditinjau dari SAK tidak sesuai karena pada Bank Muamalat pendapatan provisi dan komisi langsung diakui semua sebagai pendapatan pada periode tersebut, sedangkan pada SAK pendapatan komisi dan provisi tidak langsung diakui keseluruhannya sebagai pendapatan pada periode tersebut tetapi diestimasi sesuai dengan jangka waktu kredit. Hal ini lebih jelas menggambarkan berapa pendapatan komisi dan provisi pada setiap periode.

Saran

PT. Bank Muamalat Indonesia dalam menerapkan perlakuan akuntansi

terhadap pengakuan pendapatan komisi dan provisi sebaiknya disesuaikan dengan SAK dimana pendapatan komisi dan provisi tersebut diamortisasi secara sistematis dalam setiap jangka waktu kredit sehingga lebih jelas menggambarkan laporan rugi laba sebenarnya pada setiap periode karena pendapatan komisi dan provisi yang seharusnya diakui dan untuk pendapatan komisi dan provisi diterima dimuka.

DAFTAR PUSTAKA

- Arifin, Zainul, 2000, *Memahami Bank Syariah, Bank Muamalat Indonesia*, Cetakan Ketiga, Alvabet: Jakarta.
- Ascarya, 2004, *Mencari Solusi Pembiayaan Bagi Hasil Perbankan Syariah*, Bank Indonesia: Jakarta
- Adiwarman, Karim, 2005, *(Bank Islami) Analisis Fiqih dan Keuangan*. Rajawali Pers: Jakarta.
- Antonio Syafi'I, 2000, *Konsep Bank Syariah, Bank Muamalat Indonesia*: Jakarta.
- Departemen Agama Republik Indonesia, 2005, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* : Jakarta.
- Harahap, Sofyan Syafri, 2002, *Teori Akuntansi*, Edisi Revisi, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada.
- Hadiwijaya. H & R. A. Rivai Wirasmita, 2003, *Analisis Kredit*, Pionir Jaya, Bandung.
- IAI, 2009., *Dewan Standar Akuntansi Keuangan*, Jakarta.

Kasmir, 2002, *Dasar-Dasar Perbankan*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.

Kasmir, 2008, *Bank dan Lembaga Keuangan Lain*. Rajawali Pers : Jakarta.

Nurhayati Sri-Masilah, 2009, *Akuntansi Syariah Di Indonesia*, Salemba 4, Jakarta.

Santoso, Try, Ruddy, 2002, *Kredit Usaha Perbankan*, Yogyakarta, PT. Andi

S.P. Hasibuan, Malayu, 2005, *Dasar-Dasar Perbankan*, Cetakan

Keempat, Jakarta, PT. Bumi Aksara.

Sugiyono, 2005, *Metode Penelitian Administrasi*, Edisi Keduabelas, Bandung Alfabeta.

Undang-undang Nomor 10 tahun 1988 Tentang Perbankan.

Wiyono Slamet, 2006, *Akuntansi Perbankan Syariah*; Grasindo, Jakarta.

www.Bankmuamalat.Com, Diakses. 12 Juli 2012

***) Penulis adalah Dosen DPK pada STIE YPUP Makassar**